

masyarakat yang terdampak tol Jombang – Mojokerto tujuannya agar hak- hak masyarakat terpenuhi dalam penggusuran lahan tol Jombang – Mojokerto. Sedangkan Gerakan masyarakat peduli agraria salah satu elemen *civil society* pada penggusuran lahan pada pembangunan tol Jombang – Mojokerto, organisasi yang tergabung dalam aliansi gempar atas dasar secara sukarela untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, dan kemandirian tinggi terhadap negara, gempar adalah gerakan yang muncul karena melihat isu isu pembangunan di Jombang yang tidak melihat dampak kerugian terutama pada tol Jombang -Mojokerto, gerakan ini menuntut kebijakan pemerintah dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Jombang yang seharusnya melihat unsur -unsur kerugian.

Strategi Kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang menggunakan 3 strategi lawyering, advokasi, keterlibatan kritis. strategi lawyering bahwa Kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang berhasil menggalang kekuatan dengan bekerja sama dengan seluruh elemen organisasi yang ada di Jombang serta mampu menyatukannya di dalam sebuah gerakan yaitu gerakan masyarakat peduli agraria Jombang (GEMPAR) yang terdiri dari Women Crisis Center Jombang, Gerakan Mahasiswa Persatuan Indonesia (GMPI) Jombang, LapeksdamNU, Himpunan Mahasiswa Islam Jombang (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia(GMNI), Korsorsium Mahasiswa Jombang (KMJ), BEM UNRAR dengan melakukan aksi untuk mendesak pemerintah bahwa ada hak- hak masyarakat yang harus di selamatkan pada pembangunan tol Jombang – Mojokerto.

Strategi pendampingan /advokasi kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang sudah melakukan pendampingan dengan Memberikan edukasi ke warga bagaimana menyampaikan tuntutan dan pendapat di muka umum. Dan memberikan pemahaman kepada warga korban pembangunan tol tentang bagaimana hak ekonomi, budaya, politik. Melakukan investigasi secara menyeluruh secara administrasi maupun non administrasi terhadap tahapan - tahapan dalam pembangunan tol Jombang –Mojokerto, melaporkan hasil temuan investigasi kepada komnas HAM terkait pelanggaran HAM nya, melaporkan ke ombusment terkait pelanggaran administrasi instansi /lembaga Negara penyelenggara tol yaitu BPJT. Strategi keterlibatan kritis yaitu melalui kegiatan hearing ini kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang berkerja sama dengan komisi A dan C DPRD Kabupaten Jombang.

B. Saran

Pembangunan tol Jombang – Mojokerto seharusnya pemerintah lebih memperhatikan dampak negatif maupun positif pada pembangunan tersebut dalam hal kondisi yang seperti ini seharusnya kontras Surabaya dan gerakan aliansi masyarakat peduli agraria dapat mengambil peran untuk memperbaiki kondisi yang ada dalam rangka menciptakan *civil society* yang kuat dan mandiri melalui peran – peran – peranya. Dan agar NGO tidak terjebak oleh isu- isu pemerintah yang ada dan NGO mampu membantu memperjuangkan masyarakat.

